

Fintech System; Studi Hambatan Inklusi Keuangan UMKM di Kota Makassar

Erwin¹

Andi Faisal Anwar²

Email: faisal.anwar@uin-alauddin.ac.id

^{1,2} Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and explain further, what are the obstacles to financial inclusion through the existence of a fintech system in Makassar City. And the results of this study are expected to be able to provide benefits to academics, lecturers, students and the government regarding the barriers to financial inclusion through the existence of a fintech system for MSMEs in Makassar City. This type of research used in this study is a type of quantitative research in which this research is an inquiry strategy that emphasizes the search for meaning, concepts, understandings, characteristics, symbols, symptoms, and descriptions of phenomena that are carried out in the Makassar City area. The data source of this research is to use primary and secondary data through interviews and data collection from various agencies in the form of documents and archives. So as for the results of this study it can be concluded that almost all of the informants are still unfamiliar with the lending process as such, there are several obstacles which then cause MSME entrepreneurs not to use or use the lending mode other than because they are afraid to deal with such lending, they also feel they do not know in detail about the procedural and procedures for using android-based loan services and technology. This is due to several obstacles including business actors who have not received clear information either through the media or through massive and direct socialization by the lending service providers so that businesses are still hesitant to use technology-based lending services, not to mention a lot of slanted news circulating among business actors for insecurity, that is, those from providers of technology-based lending services cannot guarantee the privacy of customers when borrowing money through technology-based applications, many assume that fraud often occurs when using instant technology-based lending services. then increasing the doubts of business actors.

Keywords: *Financial Inclusion, MSME, Fintech System.*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan lebih jauh, bahwa apa saja yang menjadi hambatan-hambatan inklusi keuangan melalui keberadaan fintech system yang ada di Kota Makassar. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada akademisi, dosen, mahasiswa maupun pemerintah mengenai hambatan-hambatan inklusi keuangan melalui keberadaan *fintech system* terhadap UMKM di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif di mana penelitian ini merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, konsep, pengertian, karakteristik, simbol, gejala, maupun deskripsi tentang fenomena yang dilaksanakan di lingkup wilayah Kota Makassar. Sumber data dari penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data skunder yaitu melalui wawancara dan pengumpulan data dari berbagai badan instansi

ARTICLE INFO

Received 23 Februari 2021

Accepted 20 April 2021

Online 28 April 2021

*Correspondence: Andi Faisal Anwar

E-mail: faisal.anwar@uin-alauddin.ac.id

tertentu berupa dokumen dan arsip. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hampir keseluruhan dari pelaku UMKM masih awam akan proses akses keuangan melalui *fintech system*. Ada beberapa hambatan yang kemudian menyebabkan para pelaku usaha UMKM tidak memakai atau menggunakan mode peminjaman tersebut, selain karena mereka takut untuk berurusan dengan *fintech system*, mereka juga merasa belum mengetahui secara detail akan prosedural dan tata cara dalam menggunakan jasa peminjaman berbasis teknologi. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa hambatan, di antaranya para pelaku usaha belum mendapat informasi yang jelas baik melalui media, maupun sosialisasi secara massif dan langsung oleh pihak penyedia jasa peminjaman tersebut, sehingga para pelaku usaha masih ragu untuk memakai jasa peminjaman berbasis teknologi, belum lagi banyak berita miring yang beredar dikalangan para pelaku usaha akan ketidakamanan model pinjaman seperti itu, pihak dari penyedia jasa peminjaman berbasis teknologi *fintech* tidak mampu menjamin privasi dari para pelanggan, jika meminjam uang melalui aplikasi berbasis teknologi, banyak yang beranggapan sering terjadi tindak penipuan apabila memakai jasa peminjaman berbasis teknologi yang tergolong instant tersebut. Hal ini yang kemudian semakin menambah keraguan para pelaku usaha. Implikasi dari penelitian ini adalah pemerintah bersama stakeholder lainnya perlu meningkatkan literasi keuangan pada kalangan pelaku usaha UMKM, serta memberikan jaminan financial security kepada pelaku usaha, sehingga inklusi keuangan dapat berjalan secara akseleratif dan lebih ekspansif kedepannya.

Kata Kunci: Inklusi Keuangan, UMKM, Fintech System.

Pendahuluan dan Tinjauan Literatur

Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar kian semakin eksklusif dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi yang ada belum mampu memaksimalkan serapan tenaga kerja, hingga angka pengangguran juga kian semakin masif. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Makassar dalam lima tahun terakhir berada di atas provinsi, meski trennya cenderung turun. TPT Kota Makassar tahun 2014 sudah mencapai dua digit, yaitu 10,90 persen, sementara provinsi hanya 5,10 persen. Angkanya meningkat jadi 12,02 persen ditahun 2015, sebelum kemudian turun ke 10,59 persen tahun 2017, begitupun dengan provinsi, naik hingga 5,95 persen dan kemudian turun 5,61 persen (BPS Kota Makassar, 2020).

Memasuki Tahun 2018 angka TPT Kota Makassar paling tinggi sepanjang periode lima tahun karena mengalami kenaikan sampai 12,19 persen, sementara provinsi turun ke 5,34 persen. Kinerja pertumbuhan ekonomi Kota Makassar tahun 2019 nampaknya memberikan dampak positif bagi penyerapan tenaga kerja, sebab di tahun tersebut TPT menurun di angka 10,39 persen, paling rendah sepanjang periode ini. Penurunan TPT Kota Makassar juga diikuti oleh Sulawesi Selatan yang mampu menurunkan TPT sampai 4,97 persen. Meskipun menurun, pemerintah daerah nampaknya kesulitan menurunkan TPT menjadi satu digit, sehingga dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, Kota Makassar menjadi daerah dengan TPT paling tinggi (BPS Kota Makassar, 2020).

Padahal, dilihat dari angka statistik yang ada justru menunjukkan perekonomian Kota Makassar tumbuh paling impresif di Sulawesi Selatan. Hal itu dijustifikasi dengan munculnya paparan Badan Pusat Statistik Kota Makassar yang ikut mengkonfirmasi bahwa pertumbuhan ekonomi kota ini mampu pertumbuhan ekonomi 8,79 persen tahun 2019, tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pertumbuhan impresif lapangan usaha perdagangan besar dan eceran yang menggantikan posisi industri pengolahan sebagai "*leading sector*" adalah salah satu faktor pemicu (BPS Sulawesi Selatan, 2020).

Melihat kontradiksi faktual ini, menggambarkan bahwa dibalik capaian-capaian positif ekonomi Kota Makassar, justru di saat yang sama kota ini berada di bawah bayang-bayang tingkat pengangguran yang cukup memprihatinkan. Kontradiksi di atas ikut membenarkan bahwa praktik pembangunan perekonomian Kota Makassar, selama ini berjalan ilusif dan kurang mengakomodir kepentingan kelas bawah. Salah satu hal yang menjadi penyebabnya

adalah kesempatan para pelaku usaha mikro kecil (UMKM) untuk mengakses permodalan dari lembaga keuangan yang semakin terbatas. Persoalan aksesibilitas keuangan, menjadi persoalan mendasar para masyarakat rentan ini. Hal ini menjadi masalah yang cukup serius bagi masyarakat. Kebede, et.al (2021) di tengah kondisi sosial ekonomi yang tidak menentu, para kelompok rentan maupun pelaku usaha UMKM, cukup susah untuk beranjak dari situasi itu karena akses keuangan yang didapatkan sangat rendah, untuk menggerakkan usaha kecil yang secara keseharian mereka jalani, hal ini menjadi semacam barrier on *financial inclusion* (Baker, 2021; Chatterjee, 2020; Despard, et.al, 2020; Pomeroy, et.al, 2020; Saydaliyev, et.al, 2020; Srouji, 2020).

Soyemi, et.al (2020) salah satu ujung tombak penguatan inklusi keuangan yakni penguatan aksesibilitas *fintech system*. Kehadiran *financial technology (fintech)* didorong untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia secara umum, termasuk Kota Makassar. Di Indonesia, fintech kebanyakan masih berbisnis payment seperti sistem pembayaran *e-money*, *e-wallet*, dan sebagainya. Sementara jumlah fintech yang menyalurkan kredit porsinya masih di bawah pembayaran. Mengingat, kebanyakan pelaku fintech bertujuan menyasar masyarakat perkotaan maupun perdesaan yang belum layak mendapat pembiayaan dari bank (*unbankable*). Memburuknya inklusi keuangan diberbagai wilayah, diakibatkan banyaknya UMKM yang tidak dapat mengakses bantuan keuangan *microfinance* untuk mengembangkan usaha pada skala yang lebih besar (Arunachalam & Crentsil, 2020; Churchill & Marisetty, 2020; Li et al., 2021; Lotto, 2020; Mhlanga, et.al, 2020; Murendo, et.al, 2021; Niankara & Muqattash, 2020).

Menurut Churchill, et.al (2020) mengungkapkan bahwa masyarakat yang berpenghasilan rendah, berpendapatan tidak menentu dan tidak pasti, merupakan kelompok yang tidak mampu mengakses layanan keuangan. Padahal akses keuangan akan membantu mereka merencanakan masa depan dan melindungi diri dari hal-hal tak terduga. Uang tunai juga sangat rentan terhadap pencurian. Sementara itu, layanan tabungan informal yang tersedia di pasar berkembang sering kali disertai dengan biaya administrasi yang besar. Pada dasarnya orang miskin tidak dapat menabung, baik dalam bentuk uang tunai, maupun tabungan tersembunyi di bawah kasur atau dalam stoples kaca, meskipun ketika mereka memiliki uang namun mudah untuk dibelanjakan, sebab mereka hidup di bawah tekanan kebutuhan ekonomi yang begitu kompleks. (Alhassan, et.al, 2021; Bazarbash, et.al, 2020; Čihák, et.al, 2021; Cull, et.al, 2021; Didenko, et.al, 2020; Gyasi & Adam, 2021; Lu, Wu, & Liu, 2020; Sha'ban, et.al, 2020).

Namun, hal ini berbeda dengan menurut Raichoudhury, (2020) literasi keuangan dapat merupakan pemahaman komprehensif serta mendalam tentang pengelolaan keuangan personal atau keluarga yang membuat seseorang mempunyai kuasa, pemahaman dan keyakinan penuh terhadap keputusan keuangan yang diambil. Seperti yang diungkapkan sebelumnya bahwa edukasi literasi keuangan sebagai kemampuan membaca, menganalisis, mengelola, dan berkomunikasi tentang kondisi keuangan yang mempengaruhi kesejahteraan. Literasi keuangan mencakup kemampuan untuk memilah kebutuhan keuangan, kebutuhan perencanaan keuangan, dengan belajar tentang literasi keuangan, mampu memahami peristiwa perekonomian secara umum, dan ketetapan dalam pengambilan keputusan keuangan sangat menentukan pada kesejahteraan manusia dimasa

yang akan datang. Manusia perlu dibekali dengan pendidikan literasi keuangan yang baik dan terencana.

Pemahaman tentang literasi keuangan sebagai proses membangun kemampuan tentang produk-produk serta konsep keuangan melalui informasi, instruksi dan nasihat untuk mengembangkan keahlian serta kepercayaan diri dan kesadaran terhadap risiko keuangan. Mampu mengatasi dengan perlindungan asuransi serta meningkatkan peluang membuat keputusan keuangan yang cerdas. Mengetahui tentang produk-produk keuangan, dan mampu membuat tindakan alternatif untuk meningkat kesejahteraan (Akanfe, et.al, 2020; Anarfo & Abor, 2020; Dabla-Norris, et.al, 2021; Nizam, et.al, 2020; Schuetz & Venkatesh, 2020; Siddik & Kabiraj, 2020; Usman, et.al, 2021).

Menurut Xu (2020) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi, karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relative tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil. Hal ini membuat UMKM dapat menunjang pertumbuhan ekonomi yang digunakan sebagai penunjang pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan. Rendahnya tingkat investasi dan produktifitas, serta rendahnya pertumbuhan usaha baru perlu memperoleh perhatian serius pada masa mendatang dalam rangka mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menuju pada usaha berdaya saing tinggi (Adegbite & Machethe, 2020; Demirgüç-Kunt, et.al, 2020; Huang, et.al, 2021).

Keberadaan UMKM hendaknya diharapkan dapat memberi kontribusi yang cukup baik terhadap uaya pengangguran masalah-masalah yang sering dihadapi seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan segala aspek yang tidak baik. Peranan UMKM di Indonesia, yang merupakan salah satu komponen dari sektor industri pengolahan, secara keseluruhan mempunyai andil yang sangat besar dalam menciptakan lapanga pekerjaan bagi masyarakat. Salah satu ciri umum yang melekat pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia adalah permodalan yang masih lemah. Padahal modal merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung peningkatan produksi dan kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) itu sendiri, terlebih pada pengusaha mikro maupun pedagang golongan ekonomi lemah (usaha kecil).

Pada kalangan ekonomi lemah ini biasanya terdapat masalah yaitu kekurangan modal, sehingga seringkali mengalami hambatan dan kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Pengusaha atau pedagang kecil kerap kali terjebak dengan kebutuhan permodalan dan untuk mengambil cara cepat pedagang maupun pengusaha mikro akan meminta bantuan permodalan dana atau kredit usaha kepada rentenir atau praktek lintah darat tersebut. Banyak dari pengusaha atau pedagang kecil ini tidak terlalu memperhatikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi kepada renternir sebelum meminjam sejumlah uang atau modal karena kebutuhan yang sangat mendesak (Omar & Inaba, 2020; Ratnawati, 2020; Sahay et al., 2020).

Data dan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah digunakan adalah metode Kualitatif. Penelitian ini merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, konsep, pengertian, karakteristik, simbol, gejala, maupun deskripsi tentang fenomena

(Creswell, 2007; Edwards dan Holland, 2015; Moleong, 2005). Penelitian ini dilaksanakan di lingkup wilayah Kota Makassar. Lokasi penelitian dipilih dikarenakan Kota Makassar merupakan daerah dengan penduduk terbanyak, yang sekaligus memiliki UMKM paling banyak di Sulawesi Selatan. Sumber data dalam penelitian ini adalah berbagai macam sumber yang diperoleh melalui data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung oleh pelaku UMKM, melalui dari daftar pernyataan atau kusioner yang telah disediakan oleh data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan langsung).

Hasil dan Pembahasan

Merujuk pada penelusuran dari berbagai informan tentang analisis hambatan-hambatan inklusi keuangan melalui *fintech system* terhadap UMKM di Kota Makassar dapat dilihat dari hasil triangulasi indepth interview dengan beberapa narasumber (Informan). Data tentang Hambatan inklusi keuangan melalui fintech sistem terhadap UMKM di Kota Makassar diperoleh melalui wawancara dengan informan:

“Saya mendirikan usaha warung makan ini baru 2 bulan dan untuk membuka usaha dengan uang sendiri. Hasil penjualan setiap hari biasanya dapat Rp. 500.000 dan yang didapat untuk penjualan hari ini diluar dari modal awal diputar untuk penjualan besok harinya. Karna saya malas berurusan dengan bank, takut pinjam uang di Bank tidak mau terbebani dengan pembayaran perbulannya. saya tidak pernah meminjam uang lewat HP takut dan tidak tau menggunakan pinjaman berbasis fintech”

(Wawancara bersama Nurlaela Mallo, pekerja warung makanan, 14 Oktober 2019)

Wawancara bersama ibu Nurlaela di tempat warung makan miliknya yang berada di area sekitar Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Di saat itu informan mencoba mengutarakan di mana ia memulai pekerjaan dan usaha warung makannya. Ibu Nurlaela adalah seorang pensiunan PNS (kepala dinas Pariwisata), dan setelah pensiun ibu Nurlaela pun memulai usaha dan mendirikan warung makan di salah satu tempat yang berada di Kota Makassar yaitu di Kecamatan Tamalate, usaha Ibu Nurlaela baru berjalan 2 bulan pada saat itu dan yang digunakan untuk usahanya memakai modal sendiri, dari usaha warung makannya itu penghasilan yang didapat dari penjualannya sekitar Rp. 500.000 /hari.

Namun hasil yang didapat setiap harinya diputar lagi menjadi modal untuk penjualan besok harinya. Namun ibu Nurlaela, tidak ingin meminjam uang di bank karena tidak ingin terbebani dengan pembayaran setiap bulan. Selain itu, ia merasa takut untuk mengambil uang pinjaman di bank. Ibu Nurlaela juga tidak ingin menggunakan pinjaman berbasis teknologi fintech karena takut dan tidak mengerti cara menggunakan pinjaman tersebut. Hal ini sejalan dengan temuan Huang et al., (2021) bahwa inklusi keuangan dianggap sebagai sarana penting untuk mewujudkan tujuan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Inklusi keuangan memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam proses pertumbuhan dengan meningkatkan akses mereka ke peluang ekonomi dan memperluas pilihan mereka, yang pada akhirnya membuat agen ekonomi lebih produktif dan efisien. Ini bisa mengarah pada pengentasan kemiskinan dengan dua cara. Pertama, peningkatan ketersediaan sumber daya

keuangan meningkatkan akses ke pendidikan, peningkatan wirausaha dan pengembangan manusia yang membantu pengentasan kemiskinan.

Berbeda dengan informasi yang disampaikan oleh Muliadi yang juga bekerja sebagai pekerja warung makan, yang menyampaikan bahwa:

“Saya memulai usaha warung makan ini belum cukup 1 tahun dengan meminjam modal dari keluarga, saya takut meminjam ke bank karna malu dan takut berurusan dengan pihak bank yang terkadang banyak prosedurnya yang harus dipenuhi, saya juga tidak mau meminjam modal lewat aplikasi di HP karena saya belum mengetahui pasti persyaratannya, itu yang membuat saya takut meminjam uang lewat aplikasi HP, modal awal untuk membangun usaha warung makan saya sekitar 100 juta”

(Wawancara bersama Muliadi, pekerja warung makan, 18 Oktober 2019)

Wawancara dengan Muliadi di salah satu tempat warung makan miliknya yang berada di sekitar wilayah Kecamatan Tamalate, Kota Makassar di saat itu pula informan mencoba mengutarakan pada saat memulai usaha warung makan. Sebelum Pak muliadi memulai usahanya beliau terlebih dahulu belajar di tempat kursus memasak selama kurang lebih satu bulan sampai kemudian Pak Muliadi bisa memasak tidak lama setelah itu ia mulai mencari modal usaha untuk warung makannya dengan meminjam dari keluarga untuk menambah modalnya yang belum cukup waktu itu, setelah modal terkumpul barulah kemudian pak muliadi berani memulai usaha warung makan, pendapatan yang dihasilkan dari usaha rumah makan tersebut sekitar Rp. 800.000.00/hari, dari hasil pendapatannya itu kemudian beliau putar lagi untuk jadi modal penjualan untuk besok harinya. Alasan pak muliadi kenapa kemudian dia takut untuk meminjam ke pihak bank karna merasa peminjaman modal melalui bank memiliki banyak prosedur dan persyaratan yang tidak mudah, begitu juga dengan peminjaman melalui gawai atau berbasis teknologi selain tidak mengerti prosedur peminjamannya, dia juga takut jika ditipu oleh pihak penyedia dana berbasis teknologi fintech tersebut.

Hal ini sejalan dengan temuan N’dri dan Kakinaka, (2020) bahwa Inklusi keuangan yaitu suatu proses yang memastikan akses, penggunaan, dan ketersediaan sistem keuangan formal kepada semua anggota dalam suatu perekonomian. Subjek telah dipelajari secara luas dan beberapa inisiatif telah diluncurkan secara global untuk mempromosikan inklusi keuangan kepada populasi. Menyadari pentingnya pembangunan, inklusi keuangan juga dimasukkan dalam tujuan global PBB. Sistem keuangan yang mencakup semua memungkinkan keluarga untuk mengatur pendapatan mereka dan merencanakan pengeluaran di masa depan; dan pada level makro, membangun semangat kewirausahaan dan mendorong penciptaan lapangan kerja. Tujuan visibilitas pemerintah yang lebih besar terhadap sistem fiskal, memfasilitasi peningkatan legalitas transaksi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa inklusi keuangan terkait dengan pembangunan (Bazarbash et al., 2020; Friedline, Naraharisetti, & Weaver, 2020; Kandpal & Mehrotra, 2019; Lagna & Ravishankar, 2021; Mehrotra, 2019; Zetsche, Buckley, & Arner, 2019).

Berbeda dengan informasi yang disampaikan oleh ibu Fitria Idris yang memiliki usaha warung makan (wiraswasta), yang menyampaikan bahwa:

“Saya tidak pernah meminjam modal usaha di bank, untuk usaha saya yang masih tergolong usaha yang kecil, kecuali jika saya ingin memulai usaha yang membutuhkan modal besar, mungkin saya juga akan meminjam di bank, untuk peminjaman melalui fintech, saya juga sempat baca diartikel dan surat kabar soal itu, hanya saja saya tidak tertarik untuk meminjam melalui teknologi tersebut karena menurut saya peminjaman modal seperti itu berbeda dengan bank, kalau bank sudah pasti menjamin privasi kalau dengan model seperti itu, mungkin tidak bisa menjamin privasi saya. Kan hutang itu privasi, ada banyak lagi info yang saya dapat tentang peminjaman seperti itu, dari teman dekat dan keluarga tapi memang saya tidak berniat mempelajari lebih lanjut, mengenai proses peminjaman seperti itu. Saya pribadi juga takut diteror oleh penagih dari pihak penyedia modal pinjaman berbasis android itu”. (Wawancara bersama Fitria Idris, pemilik usaha warung makan, 21 Desember 2019).

Wawancara dengan Ibu Fitria Idris di salah satu tempat usaha warung makan miliknya yang berada di sekitar Jl. Toddopuli, Kota Makassar, di mana saat itu informan mencoba mengutarakan pendapatnya saat ditanya perihal peminjaman melalui bank dan peminjaman berbasis teknologi fintech. Dalam hal peminjaman modal melalui bank, sebenarnya ia biasa meminjam di bank tapi dalam hal usaha warung makannya dia tidak memerlukan modal dari bank karena menganggap usaha warung makannya masih kecil dan tidak memerlukan modal yang besar. Ibu Fitria juga sempat menuturkan bahwa dia akan meminjam ke bank jika usaha yang ia ingin jalankan memerlukan modal yang besar.

Perihal peminjaman berbasis fintech, dia sudah banyak mendapatkan informasi baik itu dimedia cetak, artikel dan juga keluarga serta kerabatnya, maupun media sosial. Hanya memang dia tidak pernah tertarik atau mencoba mempelajari lebih lanjut, mengenai prosedur dan proses pinjaman berbasis teknologi fintech tersebut. Dia merasa jika meminjam dengan model seperti itu, ia tidak bisa menjamin privasi dari peminjam modal atau pelanggan, lebih lanjut dia juga terlalu banyak mendengar informasi negatif mengenai peminjaman berbasis fintech tersebut, hal ini yang kemudian menyebabkan Ibu Ftria takut untuk berurusan penyedia pinjaman berbasis teknologi tersebut. Selain itu, ibu Fitria juga beranggapan bahwa bunga pinjaman berbasis teknologi fintech, bunganya jauh lebih tinggi dibanding melalui pihak bank.

Hal ini sejalan dengan temuan Senyo dan Osabutey, (2020) Aisyah dan Qadri, (2019), Syukri (2019) bahwa akses keuangan merupakan akses penting penggerak roda perekonomian yang digunakan oleh pemerintah bagi pelaku UMKM untuk merangsang pertumbuhan. Hal itu disebabkan kemampuannya untuk memfasilitasi alokasi sumber daya produktif yang efisien, sehingga mengurangi biaya modal. Proses ini sebaliknya disebut sebagai sistem keuangan inklusif, yang dapat secara signifikan meningkatkan pengelolaan keuangan sehari-hari, serta mengurangi pertumbuhan sumber kredit informal (seperti pemberi pinjaman uang), yang sering dianggap eksploitatif. Sistem keuangan inklusif sekarang dikenal luas sebagai prioritas kebijakan di banyak negara, dengan inisiatif yang datang dari regulator keuangan, pemerintah dan industri perbankan. Hanya saja memerlukan edukasi yang jauh lebih intens ke calon penggunanya. Inklusi keuangan memiliki dampak *multiplier effect* bagi

pertumbuhan dan misi *good development* bagi tiap negara (Adegbite & Machethe, 2020; Demirgüç-Kunt et al., 2020; Koomson, et.al, 2020; Demir, et.al, 2020; Loo, 2019; Ozili, 2020; Siddiqui & Siddiqui, 2020).

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa aksesibilitas keuangan UMKM berbasis fintech nampaknya diperhadapkan banyak hambatan ditingkatkan pelaku usaha UMKM. Adapun hambatan-hambatan yang dimaksud, yang kemudian menyebabkan para pelaku usaha UMKM tidak memakai atau menggunakan mode peminjaman berbasis teknologi tersebut, antara lain 1). Para pelaku usaha UMKM takut untuk berurusan dengan peminjaman berbasis perbankan, apalagi dengan berbasis fintech, 2). Minimnya literasi keuangan, para pelaku usaha merasa belum mengetahui secara detail akan prosedur serta tata cara dalam menggunakan jasa peminjaman berbasis teknologi fintech, 3). Minimnya edukasi dan sosialisasi terkait urgensi *fintech system* pada kalangan UMKM. Hal ini disebabkan karena para pelaku usaha belum mendapat informasi yang jelas, baik melalui media maupun sosialisasi secara massif secara langsung oleh pihak penyedia jasa peminjaman tersebut, sehingga para pelaku usaha masih ragu untuk memakai jasa peminjaman berbasis teknologi ini, 4). Banyaknya *negative insight* hingga berita hoax yang beredar dikalangan para pelaku usaha UMKM, akan ketidakamanan model peminjaman financial seperti ini. Dimana pihak penyedia jasa peminjaman berbasis teknologi tersebut, tidak mampu menjamin privasi dari para pelanggan, jika meminjam uang berbasis teknologi fintech, 5). Para pelaku usaha UMKM nampaknya takut terjerat kasus penipuan, apabila memakai jasa peminjaman berbasis teknologi fintech, semakin menambah keraguan para pelaku usaha.

Namun, di sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa juga terdapat pelaku usaha yang telah mengenal atau mendapat pengetahuan lebih terkait jasa peminjaman tersebut. Akan tetapi, mereka tetap saja belum berminat untuk meminjam modal usaha, dikarenakan mereka menganggap proses peminjaman berbasis fintech, terlalu membebani dari persyaratan maupun tagihan yang harus dibayar setiap bulannya, yang terkadang tidak sesuai dengan pendapatan dari para pelaku usaha itu sendiri. Implikasi dari penelitian ini adalah pemerintah bersama *stakeholder* lainnya perlu meningkatkan literasi keuangan pada kalangan pelaku usaha UMKM, serta memberikan jaminan *financial security* kepada pelaku usaha, sehingga inklusi keuangan dapat berjalan secara akseleratif dan lebih ekspansif kedepannya.

Referensi

- Adegbite, O. O., & Machethe, C. L. (2020). Bridging the financial inclusion gender gap in smallholder agriculture in Nigeria: An untapped potential for sustainable development. *World Development*, 127, 104755.
- Aisyah, S., & Qadri, M. Z. (2019). Pengaruh Modal, Lokasi, dan Jam Berdagang Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 6(1), 18. <https://doi.org/10.24252/ecc.v6i1.9541>
- Akanfe, O., Valecha, R., & Rao, H. R. (2020). Design of an inclusive financial privacy index (INF-PIE): a financial privacy and digital financial inclusion perspective. *ACM*

Transactions on Management Information Systems (TMIS), 12(1), 1–21.

Alhassan, A., Li, L., Reddy, K., & Duppati, G. (2021). The relationship between political instability and financial inclusion: Evidence from Middle East and North Africa. *International Journal of Finance & Economics*, 26(1), 353–374.

Anarfo, E. B., & Abor, J. Y. (2020). Financial regulation and financial inclusion in Sub-Saharan Africa: Does financial stability play a moderating role? *Research in International Business and Finance*, 51, 101070.

Angka, D. (2020). *KOTA MAKASSAR KOTA MAKASSAR*.

Arunachalam, R. S., & Crentsil, G. L. (2020). Financial Inclusion in the Era of COVID-19. *An Online Participative Conference For Central Bankers, Ministries of Finance, Financial Sector Development & Financial Inclusion Professionals, Commercial & Microfinance Bankers, NBFIs, DFIs, MFIs, Consultants, FINTECH & RegTech Companies, Investors, Ins.*

Baker, L. (2021). Everyday experiences of digital financial inclusion in India's 'micro-entrepreneur' paratransit services. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 0308518X211026320.

Bazarbash, M., Beaton, K., & Eriksson, U. (2020). Filling the gap: Digital credit and Financial Inclusion. *IMF Working Papers*, 2020(150).

BPS. (2020). *Sulawesi Selatan Province In Figures 2020*.

Chatterjee, A. (2020). Financial inclusion, information and communication technology diffusion, and economic growth: a panel data analysis. *Information Technology for Development*, 26(3), 607–635.

Churchill, S. A., & Marisetty, V. B. (2020). Financial inclusion and poverty: a tale of forty-five thousand households. *Applied Economics*, 52(16), 1777–1788.

Čihák, M., Mare, D. S., & Melecký, M. (2021). Financial Inclusion and Stability: Review of Theoretical and Empirical Links. *The World Bank Research Observer*, 36(2), 197–233.

Creswell, J. W., & Ssp, N. (2007). *An Introduction to Mixed Methods Office of Qualitative and Mixed Methods Research*.

Cull, R., Demirguc-Kunt, A., & Morduch, J. (2021). *Banking the world: empirical foundations of financial inclusion*. MIT Press.

Dabla-Norris, E., Ji, Y., Townsend, R. M., & Unsal, D. F. (2021). Distinguishing constraints on financial inclusion and their impact on GDP, TFP, and the distribution of income. *Journal of Monetary Economics*, 117, 1–18.

Demir, A., Pesqué-Cela, V., Altunbas, Y., & Murinde, V. (2020). Fintech, financial inclusion and income inequality: a quantile regression approach. *The European Journal of Finance*, 1–22.

Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2020). The global Findex database 2017: measuring financial inclusion and opportunities to expand access to and use of financial services. *The World Bank Economic Review*, 34(Supplement_1), S2–S8.

Despard, M. R., Frank-Miller, E., Fox-Dichter, S., Germain, G., & Conan, M. (2020).

- Employee financial wellness programs: Opportunities to promote financial inclusion? *Journal of Community Practice*, 28(3), 219–233.
- Didenko, I. V., Paucz-Olszewska, J., Leonov, S. L., Ostrowska-Dankiewicz, A., & Ciekankowski, Z. (2020). *Social safety and behavioral aspects of populations financial inclusion: A multicountry analysis*.
- Edwards, R., & Holland, J. (2015). *Book review*. 18(1), 117–125.
- Friedline, T., Narahariseti, S., & Weaver, A. (2020). Digital redlining: Poor rural communities' access to fintech and implications for financial inclusion. *Journal of Poverty*, 24(5–6), 517–541.
- Gyasi, R. M., & Adam, A. M. (2021). Does financial inclusion predict a lower risk of loneliness in later life? Evidence from the AgeHeaPsyWel-HeaSeeB study 2016–2017. *Aging & Mental Health*, 25(7), 1254–1261.
- Huang, R., Kale, S., Paramati, S. R., & Taghizadeh-Hesary, F. (2021). The nexus between financial inclusion and economic development: Comparison of old and new EU member countries. *Economic Analysis and Policy*, 69, 1–15.
- Kandpal, V., & Mehrotra, R. (2019). Financial inclusion: The role of Fintech and digital financial services in India. *Indian Journal of Economics & Business*, 19(1), 85–93.
- Kebede, J., Selvanathan, S., & Naranpanawa, A. (2021). Foreign bank presence, institutional quality, and financial inclusion: Evidence from Africa. *Economic Modelling*, 105572.
- Koomson, I., Villano, R. A., & Hadley, D. (2020). Effect of financial inclusion on poverty and vulnerability to poverty: Evidence using a multidimensional measure of financial inclusion. *Social Indicators Research*, 149(2), 613–639.
- Lagna, A., & Ravishankar, M. N. (2021). Making the world a better place with fintech research. *Information Systems Journal*.
- Li, A., Gao, L., Chen, S., Zhao, J., Ujjiyad, S., Huang, J., ... Bryan, B. A. (2021). Financial inclusion may limit sustainable development under economic globalization and climate change. *Environmental Research Letters*, 16(5), 54049.
- Loo, M. K. L. (2019). Enhancing Financial Inclusion in ASEAN: Identifying the Best Growth Markets for Fintech. *Journal of Risk and Financial Management*, 12(4), 181.
- Lotto, J. (2020). Understanding financial inclusion in East Africa: How does Tanzania compare? *International Journal of Finance & Economics*.
- Lu, Z., Wu, J., & Liu, J. (2020). Bank concentration and SME financing availability: the impact of promotion of financial inclusion in China. *International Journal of Bank Marketing*.
- Mehrotra, A. (2019). Financial Inclusion Through FinTech—A Case of Lost Focus. 2019 *International Conference on Automation, Computational and Technology Management (ICACTM)*, 103–107. IEEE.
- Mhlanga, D., Dunga, S. H., & Molo, T. (2020). Financial inclusion and poverty alleviation among smallholder farmers in Zimbabwe. *Eurasian Journal of Economics and Finance*, 8(3), 168–182.
- Moleong, J. (2001). Lexy., 2002. *Qualitative Research Methodology*. Publisher Teens

Rosdakarya, Bandung.[29] Mullins, John, et Al.

- Moleong, J. (2005). *Lexy, Metodologi, John W, Creswell. Educational Research, Planning, Conduction and Evaluating Quantitative Dan Qualitative Research. International Edition.*
- Murendo, C., Murenje, G., Chivenge, P. P., & Mtetwa, R. (2021). Financial Inclusion, Nutrition and Socio-Economic Status Among Rural Households in Guruve and Mount Darwin Districts, Zimbabwe. *Journal of International Development*, 33(1), 86–108.
- N'dri, L. M., & Kakinaka, M. (2020). Financial inclusion, mobile money, and individual welfare: The case of Burkina Faso. *Telecommunications Policy*, 44(3), 101926.
- Niankara, I., & Muqattash, R. (2020). The impact of financial inclusion on consumers saving and borrowing behaviours: a retrospective cross-sectional evidence from the UAE and the USA. *International Journal of Economics and Business Research*, 20(2), 217–242.
- Nizam, R., Abdul Karim, Z., Sarmidi, T., & Abdul Rahman, A. (2020). Financial Inclusion and Firms Growth in Manufacturing Sector: A Threshold Regression Analysis in Selected Asean Countries. *Economies*, 8(4), 80.
- Of, J. (1992). *Research With Hispanic Populations*. (August), 382–384.
- Omar, M. A., & Inaba, K. (2020). Does financial inclusion reduce poverty and income inequality in developing countries? A panel data analysis. *Journal of Economic Structures*, 9(1), 1–25.
- Ozili, P. K. (2020). Financial inclusion and Fintech during COVID-19 crisis: Policy solutions. Available at SSRN 3585662.
- Pomeroy, R., Arango, C., Lomboy, C. G., & Box, S. (2020). Financial inclusion to build economic resilience in small-scale fisheries. *Marine Policy*, 118, 103982.
- Raichoudhury, A. (2020). Major determinants of financial inclusion: State-level evidences from India. *Vision*, 24(2), 151–159.
- RATNAWATI, K. (2020). The impact of financial inclusion on economic growth, poverty, income inequality, and financial stability in Asia. *The Journal of Asian Finance, Economics, and Business*, 7(10), 73–85.
- Sahay, M. R., von Allmen, M. U. E., Lahreche, M. A., Khera, P., Ogawa, M. S., Bazarbash, M., & Beaton, M. K. (2020). *The promise of fintech: Financial inclusion in the post COVID-19 era*. International Monetary Fund.
- Saydaliyev, H. B., Chin, L., & Mohamed, A. (2020). Remittance inflow and economic development: interaction with financial inclusion and human capital. *Migration and Development*, 1–18.
- Schuetz, S., & Venkatesh, V. (2020). Blockchain, adoption, and financial inclusion in India: Research opportunities. *International Journal of Information Management*, 52, 101936.
- Senyo, P. K., & Osabutey, E. L. C. (2020). Unearthing antecedents to financial inclusion through FinTech innovations. *Technovation*, 98, 102155.
- Sha'ban, M., Girardone, C., & Sarkisyan, A. (2020). Cross-country variation in financial inclusion: a global perspective. *The European Journal of Finance*, 26(4–5), 319–340.

- Siddik, M. N. A., & Kabiraj, S. (2020). Digital finance for financial inclusion and inclusive growth. In *Digital transformation in business and society* (pp. 155–168). Springer.
- Siddiqui, T. A., & Siddiqui, K. I. (2020). FinTech in India: An analysis on impact of telecommunication on financial inclusion. *Strategic Change*, 29(3), 321–330.
- Soyemi, K. A., Olowofela, O. E., & Yunusa, L. A. (2020). Financial inclusion and sustainable development in Nigeria. *Journal of Economics & Management*, 39, 105–131.
- Srouji, J. (2020). Digital payments, the cashless economy, and financial inclusion in the United Arab emirates: Why is everyone still transacting in cash? *Journal of Risk and Financial Management*, 13(11), 260.
- Syukri, A. U. (2019). Anomali Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah; Upaya Mengakselerasi Penerimaan Daerah. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 6(1), 36. <https://doi.org/10.24252/ecc.v6i1.9542>
- Usman, M., Makhdam, M. S. A., & Kousar, R. (2021). Does financial inclusion, renewable and non-renewable energy utilization accelerate ecological footprints and economic growth? Fresh evidence from 15 highest emitting countries. *Sustainable Cities and Society*, 65, 102590.
- Xu, X. (2020). Trust and financial inclusion: A cross-country study. *Finance Research Letters*, 35, 101310.
- Zetsche, D. A., Buckley, R. P., & Arner, D. W. (2019). FinTech for financial inclusion: driving sustainable growth. *Sustainable Development Goals: Harnessing Business to Achieve the SDGs through Finance, Technology, and Law Reform*, 177–203.